

SUATU PERSPEKTIF MENGENAI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA

Onny S. PRIJONO

PENDAHULUAN

Pelita III, sebagai suatu rencana pembangunan, memberikan perhatian yang pokok kepada usaha-usaha pemerataan. Sasaran ini hendak dicapai melalui delapan jalur pemerataan, yaitu pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air, dan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Apabila diteliti dengan mendalam, akan segera tampak bahwa dunia pendidikan dapat memainkan peranan dan memberikan sumbangan yang penting dalam usaha merealisasi kedelapan jalur tersebut. Tetapi untuk memenuhi tuntutan ini, dunia pendidikan perlu dipolakan dan dikelola secara baru. Walaupun dibutuhkan orientasi yang baru, usaha pembaharuan pendidikan selalu menghadapi kenyataan kompleksitas persoalannya.

Pendidikan merupakan masalah yang kompleks dan tidak

berdiri sendiri. Oleh karenanya, masalah pendidikan harus ditinjau dan didekati secara interdisipliner. Ditinjau dari segi pendekatan yang bersifat multidisipliner ini maka segera dapat dilihat bahwa dalam merencanakan suatu sistem pendidikan perlu diikutsertakan faktor-faktor antropologis, ekonomis, struktur sosial yang ada, situasi politik, falsafah hidup yang dianut, lembaga-lembaga yang ada, jenis persekolahan yang ada, termasuk guru-gurunya. Kesemua faktor ini memberi warna dan turut menentukan serta mempengaruhi sistem pendidikan yang ada.

Pendidikan sebagai suatu sistem atau konstelasi meliputi hal-hal yang fundamental seperti dasar, tujuan, sasaran, fungsi dan struktur pendidikan beserta komponen-komponennya, termasuk juga proses pelaksanaannya. Mengenai komponen dan proses pelaksanaannya tidak akan banyak dibahas dalam tulisan ini.

Di Indonesia belum terdapat suatu sistem pendidikan nasional, walaupun menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 31, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang diatur dengan Undang-undang.

Dasar, tujuan dan fungsi dari sistem pendidikan nasional secara eksplisit sudah terdapat dalam Naskah Garis-garis Besar Haluan Negara (Pola Umum Pelita Ketiga), dalam mana diisyaratkan bahwa pendidikan nasional Indonesia berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah. Juga

dinyatakan bahwa sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang yang memerlukan jenis-jenis keahlian dan ketrampilan serta dapat sekaligus meningkatkan produktivitas, mutu dan efisiensi kerja. Perlu dikemukakan bahwa titik berat program pendidikan diletakkan pada perluasan pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan pelaksanaan wajib belajar yang sekaligus memberikan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungannya serta peningkatan pendidikan teknik dan kejuruan pada semua tingkat untuk dapat menghasilkan anggota-anggota masyarakat yang memiliki kecakapan sebagai tenaga-tenaga pembangunan.

Suatu perencanaan yang baik dapat membantu dan mempermudah pelaksanaan maupun kebijakan apabila didasarkan atas perencanaan yang semesta, menyeluruh dan terpadu. Kalau dilihat dari sasaran Pelita III, yaitu 8 jalur pemerataan, maka pendidikan dapat memberikan sumbangan untuk mencapai sasaran tersebut apabila dalam merencanakannya telah diberikan fokus kepada tenaga kerja yang dibutuhkan di masa depan, jumlah tempat latihan yang dibutuhkan serta harapan akan adanya kenaikan dalam pendapatan sebagai akibat dari ketrampilan ataupun latihan yang diperolehnya.

Menurut *Antonius Wolf*,¹ perencanaan pendidikan dapat dipolakan agar:

- a) sistem pendidikan itu dibuat berdasarkan orientasi ke masa depan dengan melihat kepada tenaga kerja yang dibutuhkan;
- b) *atau* sistem pendidikan itu dibuat berdasarkan permintaan akan tempat-tempat latihan yang dibutuhkan di kemudian hari;
- c) *atau* sistem pendidikan itu dibuat berdasarkan harapan akan adanya kenaikan pendapatan sebagai akibat latihan ataupun ketrampilan yang diperolehnya.

1 Antonius Wolf, "Educational Planning and Educational Policy" dalam *Education*, Volume 13 (Tuebingen: Institute for Scientific Cooperation, 1976), hal. 86

Dalam model perencanaan yang pertama, diperhitungkan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan pada masa sekarang dan tingkat pertumbuhan perkembangan ekonomi. Hal ini dilakukan untuk mencegah jangan sampai terjadi penumpukan ataupun kekurangan tenaga kerja pada suatu sektor lapangan kerja. Untuk menghindari dilemma ini, maka untuk tujuan kalkulasi dipilih tingkat pertumbuhan gross national product (GNP) dan dihitung untuk suatu tahun target tertentu, besarnya produksi dan tentu saja kebutuhan akan tenaga kerja, kemudian kebutuhan ini didistribusikan meliputi berbagai kelompok pekerjaan. Akan tetapi di dalam proses ini terdapat beberapa faktor yang tidak diketahui, antara lain: apakah produksi nasional akan benar-benar meningkat pada tingkat yang sama seperti sebelumnya?

Titik tolak dari model perencanaan yang kedua adalah jumlah tempat latihan yang dibutuhkan. Akan tetapi di sini juga terdapat kelemahan, apakah jumlah tempat anak didik, biarpun didasarkan atas angka kelahiran untuk tahun-tahun tertentu, akan terus berkembang atau apakah ada kursus latihan lain yang menggantikannya?

Bentuk perencanaan yang ketiga membandingkan pembelanjaan bagi latihan (negeri, seperti biaya gedung sekolah dan gaji guru; swasta, seperti uang sekolah atau biaya buku pelajaran) dengan hasil yang diperoleh kembali, misalnya dalam bentuk gaji atau upah dari buruh apabila mereka sudah dilatih. Akan tetapi perbandingan ini dapat memberi gambaran yang salah, oleh karena penilaian yang berbeda, misalnya pekerjaan dengan pembayaran yang tinggi akan mendapat perhatian utama, sedangkan pekerjaan dengan pembayaran yang kurang, tetapi penting dan dibutuhkan bagi perkembangan perekonomian, akan diabaikan. Untuk menghindari anggapan yang salah maka yang harus dibandingkan dengan biaya latihan adalah bukan gaji atau upah akan tetapi jasa yang diberikan kepada masyarakat.

Dari uraian di atas tampak bahwa untuk memenuhi tun-

tutan tersebut, pendidikan perlu dipolakan dengan menggabungkan ketiga jenis perencanaan yang dijabarkan oleh Antonius Wolf di atas. Tuntutan ini jelas tidak ringan.

Dalam tulisan ini akan diajukan beberapa masalah pokok yang perlu diberi perhatian utama dalam mempolakan pendidikan dalam era pembangunan nasional.

PENDIDIKAN DAN LAPANGAN KERJA

Pendidikan sering kali dikatakan tidak relevan dengan lapangan kerja, seseorang sukar mencari pekerjaan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Di samping itu disebabkan juga karena kurangnya pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya untuk dapat bekerja. Sebaliknya juga terjadi akumulasi dan kelangkaan tenaga pada sektor-sektor tertentu. Hal ini menyebabkan orang bertanya, apakah sistem pendidikannya yang kurang sesuai (kurikulum yang kurang sesuai, perbandingan antara teori dan praktek), atautkah karena penerangan yang kurang kepada masyarakat mengenai lapangan pekerjaan yang ada, sehingga terjadi distribusi tenaga yang tidak merata. Secara eksplisit sudah disebutkan dalam GBHN bahwa sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan segala bidang yang memerlukan jenis-jenis keahlian dan ketrampilan serta dapat sekaligus meningkatkan produktivitas, mutu dan efisiensi kerja. Ketrampilan diberikan sesuai dengan kebutuhan lingkungannya serta peningkatan pendidikan teknik dan kejuruan pada semua tingkat untuk dapat menghasilkan anggota-anggota masyarakat yang memiliki kecakapan sebagai tenaga-tenaga pembangunan.

Dalam hal ini suatu perencanaan pendidikan dengan orientasi ke masa depan dengan melihat kepada tenaga kerja, tempat-tempat latihan, pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan adalah amat penting, untuk dapat memperoleh suatu struktur pendidikan nasional yang semesta, menyeluruh dan terpadu.

Suatu studi mengenai perspektif jangka panjang

perekonomian Indonesia tahun 2000 telah dilakukan, di mana antara lain dikemukakan bahwa usaha memperluas sarana pendidikan dimaksudkan untuk memperbesar jumlah murid pada usia sekolah. Usaha ini dapat mencapai dua tujuan: (a) memperkecil jumlah tenaga kerja pada usia sekolah memasuki pasaran tenaga kerja, dan (b) peningkatan mutu tenaga kerja melalui pendidikan ketrampilan. Untuk mencapai sasaran ini perlu pengadaan sarana pendidikan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat umum. Peningkatan pendapatan penduduk yang berpendapatan rendah melalui perluasan kesempatan kerja turut membantu usaha untuk mencapai sasaran ini.

Kebijakan yang dapat ditempuh dalam memperluas sarana pendidikan meliputi antara lain:

1. Perbandingan jumlah murid terhadap jumlah anak usia sekolah harus ditingkatkan dari 48,7% pada tahun 1971 menjadi 58,4% pada tahun 1985 dan sampai 70,5% pada tahun 2000 (lihat Tabel I). Untuk menunjang kebijakan tersebut maka investasi dalam bidang pendidikan harus meningkat lebih cepat dari laju pertumbuhan ekonomi; investasi perlu menyebar ke seluruh wilayah Indonesia menurut perimbangan-perimbangan kebutuhan secara riil.
2. Perbandingan jumlah murid terhadap guru harus secara berangsur-angsur diturunkan; pada saat yang bersamaan mutu tenaga pengajar perlu ditingkatkan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka jumlah guru dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjutan Atas perlu ditingkatkan dari 703 ribu pada tahun 1971 menjadi 1.412 sampai 1.459 ribu pada tahun 1985 dan 2.407 sampai 2.588 ribu pada tahun 2000 (lihat Tabel II). Peningkatan jumlah murid pada usia sekolah, peningkatan mutu tenaga pengajar adalah fungsi dari pembangunan lingkungan sekitar pada setiap wilayah tanah air dalam kerangka umum pembangunan nasional. Sehubungan dengan itu, isi kurikulum harus berkisar pada usaha memecahkan masalah pokok yang dihadapi bangsa dalam berbagai bidang:
 - (1) peningkatan ketrampilan untuk menunjang pem-

ANALISA

- bangunan pertanian, pertambangan, industri dan jasa;
 (2) peningkatan kemampuan nasional dalam pengembangan dan penerapan teknologi dalam berbagai bidang sesuai taraf perkembangan secara internasional.

Tabel I

PERKIRAAN DAN PROYEKSI PERBANDINGAN ANTARA MURID DAN ANAK USIA SEKOLAH DI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR, 1971 — 2000 (dalam %)			
Kelompok Umur	1971	1985	2000
I. 7 — 12	59,9	77,7	95,0
II. 13 — 15	44,3	47,6	57,0
III. 16 — 18	21,4	23,4	28,3
Jumlah	48,7	58,4	70,5

Catatan: Untuk kelompok umur 7 — 12 tahun diperkirakan bahwa penyediaan sarana pendidikan mencapai maksimum 98%. Hal ini disebabkan karena kalau sampai mencapai 100% hal itu sama dengan adanya kewajiban belajar, yang mengandung pengertian adanya tenaga pengawasan yang sesuai, yang tidak diperkirakan di sini.

Tabel II

PERKIRAAN DAN PROYEKSI JUMLAH KEBUTUHAN GURU DI INDONESIA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN, 1971 — 2000 (dalam ribuan)			
Tingkat Pendidikan	1971	1985	2000
Sekolah Dasar dan setingkat	508	858	1.302
Sekolah Lanjutan Pertama dan setingkat	126	377	749
Sekolah Lanjutan Atas dan setingkat	69	177	356
Jumlah	703	1.412	2.407

Usaha memperluas sarana pendidikan merupakan

pelengkap kegiatan dalam usaha menurunkan fertilitas melalui kebijakan keluarga berencana. Satu sama lain merupakan satu paket kebijakan dalam menanggulangi pengangguran.

Sasaran jumlah orang yang mendapatkan penempatan dalam lapangan kerja meliputi:

Tabel III

PERKIRAAN DAN PROYEKSI KESEMPATAN KERJA MENURUT LAPANGAN USAHA, 1971 — 2000 (dalam ribuan orang)			
<i>Lapangan Usaha:</i>	<i>1971</i>	<i>1985</i>	<i>2000</i>
I. <i>Sektor primer</i>	<i>25.016</i>	<i>27.017</i>	<i>30.671</i>
1. Pertanian	24.936	26.906	30.522
2. Pertambangan	80	111	149
II. <i>Sektor sekunder</i>	<i>3.213</i>	<i>7.743</i>	<i>16.041</i>
3. Industri	2.573	5.937	12.605
4. Bangunan	640	1.806	3.436
III. <i>Sektor tertier</i>	<i>9.398</i>	<i>21.834</i>	<i>37.084</i>
5. Pengangkutan dan komunikasi	901	1.612	3.124
6. Lainnya	8.497	20.222	33.960
Jumlah	37.627	56.594	83.796

Bilamana sasaran ini dapat dicapai, maka akan tampak bahwa peranan sektor Primer sebagai sumber mata pencaharian penduduk semakin menurun sedangkan peranan sektor Sekunder dan Tertier semakin meningkat (lihat Tabel berikut).

ANALISA

Tabel IV

PERKIRAAN DAN PROYEKSI KOMPOSISI KESEMPATAN KERJA MENURUT LAPANGAN USAHA, 1971 — 2000 (dalam %)			
<i>Lapangan Usaha</i>	1971	1985	2000
I. <i>Sektor Primer</i>	66,48	47,74	36,60
1. Pertanian	66,27	47,54	36,42
2. Pertambangan	0,21	0,20	0,18
II. <i>Sektor Sekunder</i>	8,54	13,68	19,14
3. Industri	6,84	10,49	15,04
4. Bangunan	1,70	3,19	4,10
III. <i>Sektor Tertier</i>	24,98	38,58	44,26
5. Pengangkutan	2,40	2,85	3,73
6. Lainnya	22,58	35,73	40,53
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Misalnya pada sektor Primer peranan pertanian menurun dari 66,3% pada tahun 1971 menjadi masing-masing 47,6% dan 36,4% pada tahun 1985 dan 2000. Pada sektor Tertier tampak peranan sub-sektor lainnya yang semakin meningkat (sub-sektor lainnya terdiri dari listrik, gas dan air minum, perdagangan, perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya, Pemerintahan dan lain-lain).

Pemberantasan pengangguran dapat dicapai melalui dua pendekatan:

1. perluasan kesempatan kerja dan;
2. membuka sarana pendidikan seluas mungkin.

Sedangkan perluasan kesempatan kerja dapat dicapai dengan:

- a. mengubah pola pertumbuhan produk Domestik Bruto yang tercermin dalam perubahan peranan masing-masing sektor

- perekonomian;
- b. mengembangkan dan menerapkan teknologi tepat-guna sesuai perimbangan sumber-daya modal dan tenaga kerja pada berbagai wilayah tanah air.

Satu sama lain hal itu tidak mengabaikan kenyataan bahwa pada sektor-sektor tertentu penerapan teknologi padat modal menjadi keharusan, antara lain untuk penambangan mineral. Segala sesuatu dilaksanakan dengan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi masing-masing, minimal pada tingkat 6,9% dan 7,5% rata-rata per tahun dalam periode 1975 — 1985 dan 1985 — 2000.¹

STRUKTUR SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Di bagian Pola Umum Pelita Ketiga disebutkan bahwa mutu pendidikan ditingkatkan untuk mengejar ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutlak diperlukan untuk mempercepat pembangunan. Dikemukakan bahwa sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan segala bidang yang memerlukan jenis-jenis keahlian dan ketrampilan serta dapat sekaligus meningkatkan produktivitas, mutu dan efisiensi kerja. Diharapkan agar sistem pendidikan nasional dapat menghasilkan anggota masyarakat yang memiliki kecakapan sebagai tenaga-tenaga pembangunan dengan meningkatkan pendidikan teknik dan kejuruan yang dibutuhkan pada semua tingkatan dan supaya pendidikan dasar dapat memberikan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungannya.

Dengan melihat sasaran Pelita III serta dengan berorientasi ke masa depan, maka di dalam fase pembangunan ini terutama antara lain dibutuhkan tenaga-tenaga yang trampil supaya Indonesia tidak terlalu jauh ketinggalan perkembangan teknologinya. Oleh karena itu pendidikan harus mampu

¹ Sumitro Djojohadikusumo, *Perspektif Jangka Panjang Perekonomian Indonesia Tahun 2000*, 26 Juni 1978, hal. 36 — 40

menyediakan tenaga-tenaga yang trampil untuk mengisi lapangan pekerjaan pada saat sekarang dan di kemudian hari. Melihat kepada hal ini maka perlu diadakan jenis-jenis pendidikan sebagai berikut:

Pendidikan Dasar

Setiap anak diharapkan dapat memperoleh pendidikan dasar. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pendidikan dasar adalah Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) serta program Paket "A". Karena pendidikan dasar ini diharapkan diperoleh setiap anak maka pendidikan dasar itu dapat diartikan sebagai pendidikan umum yang harus ditempuh. Untuk tahap permulaan diharapkan agar semua anak dapat memasuki Sekolah Dasar. Mungkin di masa mendatang tingkatan ini dapat dinaikkan lagi. Akan tetapi Taman Kanak-kanak belum dapat merupakan kewajiban belajar bagi setiap anak karena belum meratanya Taman Kanak-kanak sampai ke daerah-daerah. Mengingat mahalnya pendidikan Taman Kanak-kanak serta keterbatasan tenaga maka sebagian terbesar dari Taman Kanak-kanak masih ditangani oleh swasta. Oleh karena itu Taman Kanak-kanak belum bisa dijadikan sebagai persyaratan sebelum memasuki Sekolah Dasar.

Berdasarkan observasi ternyata bahwa tidak semua anak dapat menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, terutama di pedesaan. Faktor utama terjadinya angka putus sekolah yang relatif tinggi di tingkat Pendidikan Dasar, antara lain karena faktor ekonomi dan di mana tenaga mereka dibutuhkan untuk meringankan beban keluarganya. Akan tetapi dalam rangka mewujudkan pelaksanaan wajib belajar, sebagai tahap pertama diharapkan agar semua anak dapat memperoleh Pendidikan Dasar ini supaya dapat memperoleh bekal hidup.

Pada Pendidikan Dasar diberi kemampuan untuk bisa membaca, menulis, berhitung, bahasa, olah raga, pengetahuan mengenai lingkungannya serta nilai-nilai dasar kehidupan.

Setelah seorang anak melewati Pendidikan Dasar (TK dan SD; tetapi TK belum merupakan persyaratan mutlak) maka terbuka baginya untuk meneruskan pendidikannya, apakah akan

masuk jalur Pendidikan Menengah dengan tujuan untuk meneruskan sampai ke Pendidikan Perguruan Tinggi, ataukah akan masuk jalur kejuruan untuk segera masuk ke lapangan pekerjaan atau mungkin juga menciptakan suatu lapangan kerja sesuai dengan ketrampilan yang diperolehnya, ataukah akan masuk jalur Pendidikan Masyarakat untuk lebih mengembangkan diri dan masyarakatnya yang antara lain meliputi bidang spiritual-keagamaan, sosial, kultural.

Ada yang berpendapat bahwa pembagian ini setelah Sekolah Dasar terlalu awal dan terlalu selektif yang dapat menimbulkan elitisme. Akan tetapi dengan adanya mobilitas antara jenis pendidikan maka hal ini dapat teratasi.

Penerangan kepada masyarakat mengenai mobilitas ini harus jelas, untuk mencegah terjadinya elitisme dalam pendidikan.

Dalam hal seseorang langsung memasuki lapangan kerja tanpa memiliki suatu ketrampilan ataupun keahlian kerja, ia dapat mengikuti pendidikan kedinasan (*in-service training*) yang diselenggarakan oleh Departemen, Instansi ataupun Perusahaan yang bersangkutan untuk kebutuhan Departemen, Instansi ataupun Perusahaan itu sendiri atau yang setingkat.

Pendidikan Menengah/Lanjutan

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan Pendidikan Menengah adalah Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas (SMP dan SMA) Sekolah Menengah Pertama pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari Pendidikan Dasar sedangkan Sekolah Menengah Atas merupakan persiapan untuk Pendidikan Tinggi.

Apabila tamatan Sekolah Dasar memperoleh ijazah maka tamatan Pendidikan Menengah akan memperoleh diploma.

Di samping memiliki dasar-dasar ilmu pengetahuan, sikap

mental yang mantap dan berpikir sistematis dan akademis, si anak didik juga dibekali dengan ketrampilan yang dapat diperolehnya di luar sekolahnya (apabila sekolahnya tidak memiliki fasilitas tersebut atau beberapa sekolah dapat mempergunakan fasilitas bersama-sama). Ketrampilan tersebut antara lain dapat berupa kursus mengetik, tata buku, kepemimpinan, kepustakaan, filing, teknik menulis, berpidato, kesehatan masyarakat, bahasa daerah, bahasa asing, surat ijin mengemudi. Ketrampilan ini berdasarkan pilihan sendiri dan merupakan pelengkap dari kurikulum.

Ketrampilan tersebut pada umumnya diberikan agar si anak didik sebagai anggota masyarakat lebih mampu mengembangkan dirinya.

Pendidikan Perguruan Tinggi

Dari Pendidikan Menengah dapat dilanjutkan ke Pendidikan Perguruan Tinggi. Kemungkinan ini juga terbuka bagi Pendidikan Menengah Kejuruan dengan beberapa persyaratan khusus.

Pendidikan Perguruan Tinggi harus merupakan bagian integral dari usaha-usaha pembangunan baik nasional maupun regional, juga harus merupakan penghubung antara dunia ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan pada tingkat ini harus dilaksanakan berdasarkan pola pemikiran yang analitis dan berorientasi kepada pemecahan-pemecahan permasalahan dan disertai oleh suatu pandangan masa depan.

Pendidikan Kejuruan/Vokasional

Pendidikan kejuruan atau vokasional pada hakikatnya menyiapkan manusia untuk memasuki lapangan kerja, di mana diberi bekal-bekal yang diperlukan untuk memasuki lapangan pekerjaan, baik dengan kemampuan menciptakan lapangan kerja itu sendiri maupun dengan memasuki lapangan kerja yang ter-

sedia di dalam masyarakat. Oleh karena itu pendidikan kejuruan terutama terdiri dari praktek-praktek ketrampilan sebagai isi utamanya. Diharapkan bahwa pendidikan kejuruan tidak hanya sekedar menghasilkan angkatan kerja yang trainable, melainkan juga harus diusahakan agar menghasilkan angkatan kerja yang marketable. Supaya ini dapat terlaksana, seyogyanyalah pendidikan kejuruan atau vokasional juga dijadikan pusat-pusat kegiatan produktif. Dalam rangka ini dapat dibina hubungan yang erat antara dunia usaha dan asosiasi-asosiasi yang ada dengan sekolah-sekolah kejuruan serta perlu diadakan penyesuaian dalam perundang-undangan perusahaan.

Orientasi pendidikan kejuruan antara lain meliputi bidang teknologi, industri, perdagangan, pertanian, peternakan dan jasa. Pendidikan kejuruan dilaksanakan di sekolah-sekolah teknik menengah (pertama dan atas), sekolah dagang menengah (pertama dan atas) dan seterusnya. Kemudian perlu diadakan pendidikan kejuruan atau profesional tingkat tinggi yang dapat diwujudkan pada lembaga-lembaga seperti politeknik dan institut.

Apabila seorang lulusan pendidikan menengah mendapatkan diploma maka lulusan pendidikan kejuruan/vokasional mendapat sertifikat.

Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan Lainnya

Kunci permasalahan sistem pendidikan di Indonesia terutama terletak pada masalah guru, baik pengadaannya, pengangkatannya, penyebarannya, pembinaan, jenjang karier, status, dan kesejahteraannya. Oleh karena jumlah guru-guru masih banyak diperlukan, harus diciptakan mobilitas untuk mempermudah pengadaan guru. Misalnya, sebagai persyaratan untuk menjadi guru, tidak perlu harus dari suatu institut keguruan, tetapi seorang mahasiswa ataupun sarjana dari fakultas non keguruan yang berminat untuk menjadi guru dapat mengikuti program akta atau lisensiat pada suatu lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang berstatus pendidikan tinggi. Dalam kasus tertentu, untuk pengadaan guru untuk bidang-

bidang yang kurang tepat ditangani oleh lembaga khusus pengadaan tenaga kependidikan, seperti kesenian dan teknik penerbangan, dapat diadakan program pendidikan guru di universitas dan institut non keguruan.

Dalam pengadaan guru yang perlu diperhatikan adalah jumlah guru yang diperlukan untuk setiap jenis dan jenjang sekolah supaya penyebarannya merata terutama ke daerah-daerah yang membutuhkannya, juga supaya ada pemerataan dalam bidang studi yang ada.

Di samping faktor kuantitas maka kualifikasi daripada guru juga perlu diperhatikan, misalnya dengan diadakannya program-program penataran dengan sistem ditatar dan menatar yang berantai.

Supaya jumlah kebutuhan akan guru-guru dapat tercapai maka status guru selayaknya ditempatkan pada tempat yang terhormat, dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dari guru, baik pengangkatannya, jenjang kariernya (kenaikan pangkat) maupun kesejahteraannya (perbaikan gaji, jaminan kesehatan, hari tua dan perumahan).

Pendidikan Khusus

Di antara anak didik mungkin ada yang mempunyai perkembangan intelektual/penalaran dan bakat yang luar biasa. Supaya ini lebih bisa ditingkatkan serta dikembangkan diperlukan sekolah dengan pendidikan yang khusus bagi mereka, di mana penjenjangan maupun kurikulum tidak dapat disamakan dengan sekolah-sekolah yang lain. Hal ini memang akan menimbulkan elitisme tetapi di lain pihak mereka yang genius tidak dapat diabaikan, malahan perlu diperhatikan, lebih dikembangkan dan tingkatkan.

Jumlah mereka yang genius memang masih relatif kecil sekali karena itu pendidikan khusus ini termasuk mahal sekali. Tetapi dalam hal ini bukan biaya pendidikan yang dipentingkan, tetapi hasil keluaran (output) yang dihasilkan serta apa yang

dapat mereka lakukan bagi bangsa dan negaranya.

Pendidikan Kedinasan

Pendidikan kedinasan ini diadakan terutama untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga yang lebih mampu bagi Departemen, Instansi atau Perusahaan yang bersangkutan. Pendidikan kedinasan ini dapat diselenggarakan pada Tingkat Menengah dan Tingkat Pendidikan Tinggi sesuai dengan kebutuhan tenaga Departemen, Instansi atau Perusahaan yang bersangkutan.

Statuta pembentukan Akademi Kedinasan yang dilakukan oleh masing-masing Departemen bersumber dari Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Perguruan Tinggi No. 22 tahun 1961. Penyelenggaraan teknis Akademi Kedinasan dilakukan oleh Departemen yang bersangkutan, sedangkan segi-segi pendidikan umum serta kelengkapan dalam tenaga pengajarnya dipimpin dan diawasi langsung oleh Menteri yang secara formal/fungsional bertanggung jawab atas keseluruhan bidang pendidikan di Indonesia, dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Perguruan Tinggi, maka yang menjadi tujuan pembentukan Akademi Kedinasan itu antara lain ialah: memberikan pendidikan dan/atau melakukan penelitian dalam suatu bidang untuk memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga teknis khusus kedinasan yang berpendidikan tinggi bagi suatu instansi pemerintah tertentu.

Terjadinya kesimpangsiuran dalam penyelenggaraan Akademi Kedinasan selama ini antara lain disebabkan karena terputusnya rantai koordinasi antara bidang pendidikan umum dan bidang pendidikan institusional yang tercermin dalam garis koordinasi fungsional pelaksanaan tugas pemerintah pada umumnya, dan pelaksanaan pendidikan dan latihan pada khususnya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan Akademi Kedinasan

hampir tidak berbeda dengan Perguruan Tinggi yang lain. Perbedaan pokok terletak pada sifatnya yang khusus "kedinasan". Oleh karena pendidikan kedinasan merupakan suatu in-service training maka seorang lulusan pendidikan kedinasan ini diberi Surat Keterangan.

Pendidikan Kemasyarakatan

Pendidikan kemasyarakatan memberi kemungkinan perkembangan-perkembangan spiritual-keagamaan, sosial, kultural dan ketrampilan khusus di luar pendidikan formal di sekolah, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia Indonesia dalam rangka mengembangkan dirinya serta membangun masyarakatnya. Pendidikan kemasyarakatan ini terbuka bagi siapa saja yang berminat ingin lebih mengembangkan dirinya, baik moral, pengetahuan, ketrampilan, bakat dan minatnya, tanpa melihat kepada latar belakang pendidikannya. Pendidikan kemasyarakatan ini dapat berupa kursus-kursus atau suatu program pendidikan terminal atau pada tingkat pendidikan tinggi dapat berupa suatu universitas terbuka.

Pada pendidikan kemasyarakatan ini di samping adanya pengembangan individualisasi, juga ada perkembangan sosialisasi. Sebagai ilustrasi dapat diberikan contoh sebagai berikut:

Seorang ibu ingin menambah pengetahuannya serta memperluas pergaulannya. Untuk hal ini ia mengikuti suatu program pendidikan kemasyarakatan yang berupa kursus ketrampilan wanita selama 3 bulan, di mana ia belajar mengenai kesehatan wanita, kecantikan diri, perawatan badan, etika dan kepribadian, pengetahuan gizi dan cara berbusana nasional maupun barat. Sebagai seorang ibu rumah tangga ia juga ingin menambah pengetahuannya mengenai filsafat kehidupan berkeluarga, kesejahteraan dan pendidikan keluarga, psikologi anak, pengelolaan rumah tangga, seni dekorasi dan menata meja. Apabila ia ingin aktif dalam organisasi, maka ia dapat belajar cara berorganisasi, teknik berbicara dan sebagainya.

Pada tingkat pendidikan kemasyarakatan ini dengan mengingat masih banyaknya warga masyarakat yang belum berkesempatan bersekolah (buta huruf) dan putus Sekolah Dasar, dan supaya mereka dapat memperoleh kesempatan untuk memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap mental pembaharuan dan pembangunan maka diberi program pendidikan Paket "A" dan seterusnya. Yang dimaksud dengan Paket "A" ialah sekumpulan bahan belajar minimum yang perlu dimiliki oleh setiap warga negara yang tidak berkesempatan bersekolah (buta huruf) dan putus Sekolah Dasar, agar mereka terbantu untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan produktif. Tujuan program Paket "A", ialah meratakan pendidikan dasar kepada warga masyarakat yang tertinggal di bidang pendidikan (belum berkesempatan bersekolah dan putus Sekolah Dasar), agar mereka memiliki bekal kemampuan minimum untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan. Yang menjadi sasaran Paket "A" ialah mereka yang berusia antara 10 — 45 tahun yang tidak pernah bersekolah atau buta huruf, putus sekolah, memerlukan peningkatan pengetahuan/kecakapan dasar agar mampu memperbaiki taraf hidupnya. Prioritas akan diberikan kepada anak-anak pria dan wanita yang berusia 10 — 15 tahun. Sedangkan warga negara yang berusia 46 tahun ke atas dan buta huruf, akan dibantu pula melalui kaset, poster atau gambar yang tidak menggunakan huruf latin atau angka arab. Untuk mereka yang selesai mempelajari seluruh bahan belajar Paket "A" diadakan penilaian tentang hasil belajar berupa ujian dan kepada yang lulus diberikan Surat Tanda Serta Belajar (STSB) Paket "A". Ujian ini diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan dan permintaan warga belajar sendiri. Mereka yang berhasil mendapat STSB Paket "A" boleh memanfaatkan hasil belajarnya untuk melanjutkan belajar dengan Paket "B" dan dengan sedikit tambahan pelajaran, ikut ujian persamaan Sekolah Dasar.

Pendidikan Luar Biasa

Pendidikan luar biasa diperuntukkan bagi anak-anak yang terhambat pertumbuhannya dalam segi sosial, emosional, in-

teligensi dan segi-segi lain dalam fisik dan kejiwaan. Pendidikan luar biasa meliputi pendidikan tuna netra, tuna rungu/wicara, anak terbelakang, cacat tubuh/tuna daksa, tuna sosial/tuna laras.

Mulai tingkat pendidikan menengah diusahakan supaya anak tersebut dapat terintegrasi dalam jenis pendidikan yang lain, kalau hal ini memungkinkan baginya. Untuk hal ini dibutuhkan suatu tahap persiapan dan peralihan.

Kelompok ini perlu mendapatkan perhatian, oleh karena tanpa bantuan, bimbingan dan pendidikan, mereka tidak mampu berprestasi dan berpartisipasi di dalam kehidupan sosial. Hal ini juga sesuai dengan apa yang ditentukan oleh UUD 1945 dan karena itu diperhatikan pula di dalam Repelita II (1974/1975 — 1978/1979) Bab XXII.

MOBILITAS DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Struktur sistem pendidikan nasional berdasarkan apa yang telah dikemukakan dapat digambarkan seperti gambar pada halaman 985.

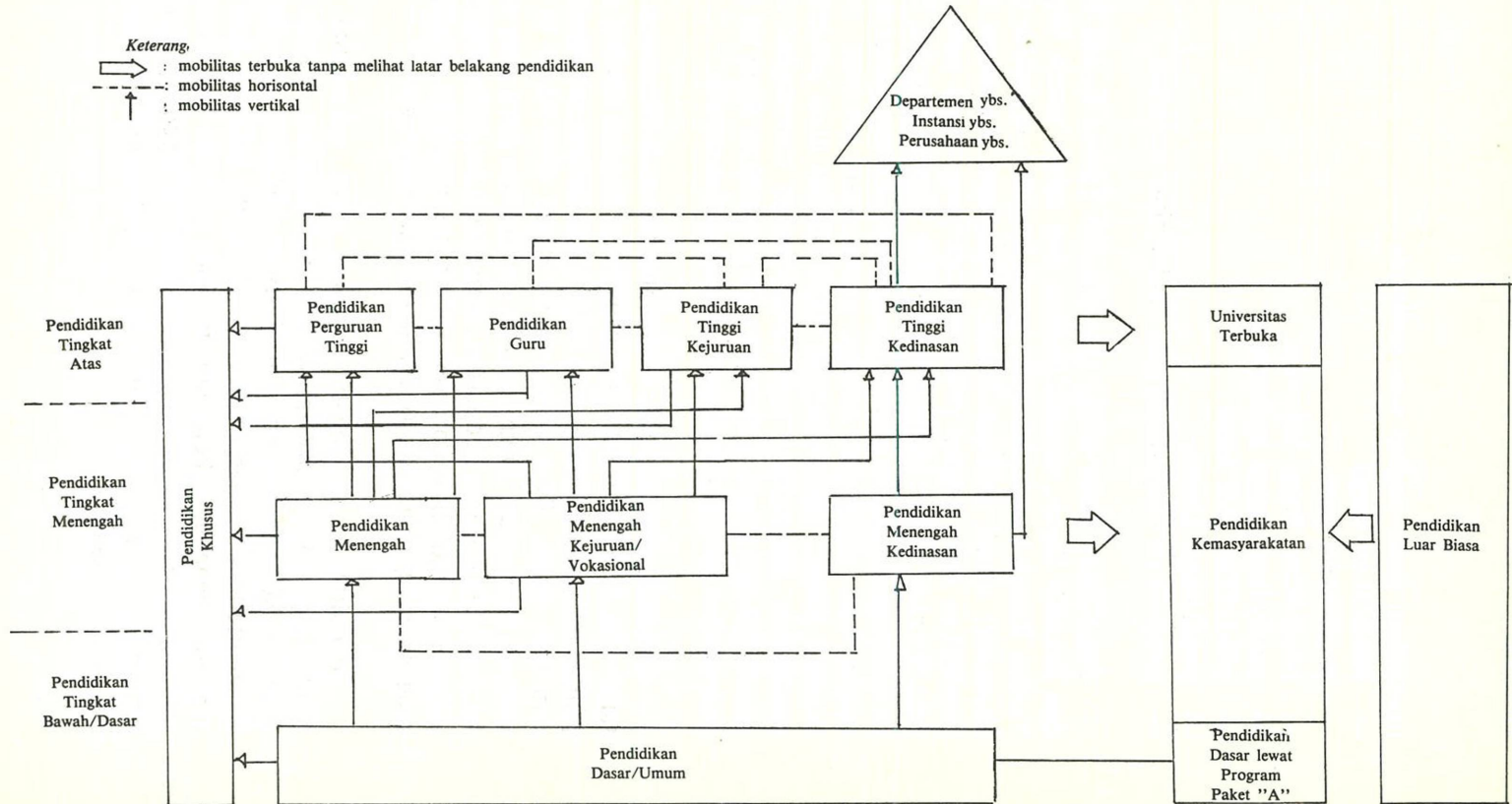
Sistem pendidikan nasional terdiri atas tiga tingkatan: pendidikan pada tingkat bawah/dasar meliputi:

- pendidikan dasar
- pendidikan kemasyarakatan (program Paket "A")
- pendidikan luar biasa
- pendidikan khusus

pendidikan pada tingkat menengah meliputi:

- pendidikan menengah (SLP, SLA)
- pendidikan menengah kejuruan
- pendidikan menengah kedinasan
- pendidikan luar biasa
- pendidikan khusus
- pendidikan kemasyarakatan

STRUKTUR SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL



pendidikan pada tingkat atas meliputi:

- pendidikan tinggi
- pendidikan guru
- pendidikan tinggi kejuruan
- pendidikan tinggi kedinasan
- pendidikan luar biasa
- pendidikan khusus
- pendidikan kemasyarakatan (universitas terbuka).

Pendidikan dasar terdiri atas Sekolah Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, dengan jenjang dua tahun untuk Sekolah Taman Kanak-kanak dan lima tahun (masih merupakan suatu alternatif) untuk Sekolah Dasar. Mengingat mahalnya biaya pendidikan serta tingkat putus sekolah yang tinggi pada kelas lima Sekolah Dasar, maka sebaiknya supaya Sekolah Dasar ini berlangsung selama lima tahun. Sekolah Taman Kanak-kanak belum bisa dijadikan sebagai persyaratan sebelum masuk Sekolah Dasar. Dalam rangka wajib belajar atau pemerataan pendidikan diharapkan agar setiap warga masyarakat dapat masuk Sekolah Dasar, oleh karena itu pendidikan dasar ini dapat juga disebut pendidikan umum karena berlaku umum.

Pendidikan menengah terdiri atas Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang masing-masing mempunyai jenjang tiga tahun atau dapat juga dengan jenjang empat dan tiga tahun. Dari tingkatan ini dapat diteruskan ke pendidikan Perguruan Tinggi atau ke pendidikan guru atau masuk ke pendidikan tinggi kedinasan. Sementara itu perlu dipikirkan pengaturan mobilitas dari pendidikan menengah ke pendidikan menengah kejuruan atau pendidikan tinggi kejuruan.

Pendidikan menengah kejuruan atau vokasional pada tingkat pertama terdiri antara lain dari Sekolah Teknik (ST), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) dan Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP). Lulusan dari pendidikan menengah kejuruan tingkat pertama ini umumnya merupakan tenaga yang setengah terlatih. Mengenai jenjangnya, umumnya berlangsung selama tiga tahun setelah memperoleh pendidikan dasar.

Sedangkan pada tingkat atas antara lain: Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan, berlangsung selama 4 tahun; lulusannya menjadi teknisi industri), Sekolah Teknologi Menengah (STM, 3 tahun; juru teknik), Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian, 3 tahun; juru teknik), Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Pembina (SMEA Pembina, 3 tahun; pengatur), Sekolah Tingkat Atas Teknologi Kerumah Tanggaan (SMTK, 4 tahun; pengatur), Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS, 4 tahun; pengatur), Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK, 3 tahun; pengatur), Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK, 3 tahun; juru), Sekolah Menengah Musik (SMM, 4 tahun; pengatur), Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR, 4 tahun; pengatur), Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI, 4 tahun; pengatur), Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan, 3 tahun; juru teknik), Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan, 3 tahun; juru teknik), Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika, 3 tahun; juru teknik), dan Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian) jurusan Teknologi Penangkapan Ikan. Lamahnya pendidikan pada tingkat atas ini terutama antara 3 dan 4 tahun, sedangkan fungsinya adalah sebagai juru, pengatur, teknisi industri dan juru teknik.

Departemen ataupun Lembaga di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan pendidikan adalah: Departemen Agama, Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, Departemen Dalam Negeri, Departemen Perindustrian, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri, Departemen Perhubungan, Departemen Penerangan, Kejaksaan Agung, Departemen Pertambangan, Departemen Kehakiman, Departemen Sosial, Departemen Perdagangan, Biro Pusat Statistik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Administrasi Negara. Pendidikan menengah pada tingkat pertama yang diselenggarakan oleh Departemen ataupun Lembaga di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

ANALISA

- Departemen Agama : Madrasah Tsanawiyah, PGA 4 tahun, Pendidikan Agama Urusan Peradilan Agama.
- Departemen Kesehatan : SPK Tingkat I, SPKTP Pengasuh Rawat, SPKTP Pengetahuan KIA, SPKTP Jurusan Pengetahuan Kusta, SPKTP Jurusan Kesehatan Jiwa.
- Departemen Pertanian : Sek. Usaha Pertanian Pertama. Sek. Pertanian Menengah Pertama.

Sedangkan pendidikan menengah pada tingkat atas adalah sebagai berikut:

- Departemen Agama : Madrasah Aliyah, PGA 6 tahun, Pendidikan Hakim Islam Negeri, PGAA Kristen/Protestan, PGAA Hindu/Budha.
- Departemen Kesehatan : Sek. Perawat Jurusan Kebidanan, Sek. Perawat Umum, Sekolah Bidan, Sek. Per. Kes. Jiwa, SPK Tk. Umum, SPK Tk. Atas C, SPK Tk. Atas Kebidanan, SPK Tk. Per. Kesehatan Jiwa, Sek. Men. Kes. Atas Gizi, Sek. Apl. Pemeriksa Kes. Masyarakat, Sek. Penjenang Kes. Tk. Atas A/B, Sek. Penjenang Kes. Tk. Atas Jr. Kusta, Sek. Mengatur Analis, Sek. Penj. Kes. Tk. Atas (Laboratorium (F)), Sek. Pengatur Rawat Gigi, Sek. Pengatur Teknik Gigi, Sek. Pengatur Rontgen, Sek. Men. Farmasi, Sek. Penjenang Tk. Atas Obat (G).
- Departemen Pertanian : Sek. Pertanian Men. Atas, Sek. Usaha Perikanan Men., Sek. Usaha Perikanan Darat Menengah Atas, Sekolah Menengah Peternakan Atas, Sekolah Polisi Kehutanan, Sekolah Kehutanan Menengah Atas.

- Departemen Perindustrian : Sekolah Teknologi Menengah Atas, Sekolah Teknik Industri Menengah Atas Banda Aceh, Sekolah Analisis Kimia Menengah Atas.
- Departemen Perhubungan : STM Kereta Api (SOKA), Sekolah Pelayaran Menengah.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia : Sekolah Instrumentasi Gelas Elektro dan Logam.

Sedangkan pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

- Departemen Agama : Institut Agama Islam Negeri.
- Departemen Kesehatan : Akademi Perawatan, Akademi Perawatan Jurusan: Guru Perawat, Guru Bidan, Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, Akademi Penata Rawat Anak, Akademi Anestesi, Akademi Gizi, Akademi Penilik Kesehatan, Sek. Pem. Penilik Hygiene (Sanitari), Akademi Penata Rontgen, Akademi Teknik Rontgen, Akademi Fisioterapi.
- Departemen Pertanian : Akademi Usaha Perikanan, Akademi Ilmu Kehutanan.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transkop : Akademi Koperasi.
- Departemen Dalam Negeri : Institut Ilmu Pemerintah, Sekolah Lanjutan Pemerintah Tingkat II (SELAPUTDA), Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, Akademi Agraria, Akademi Pendaftaran Tanah.
- Departemen Perindustrian : Perguruan Tinggi Ilmu Tekstil, Perguruan Tinggi Manajemen Industri, Akademi Teknologi Kulit, Akademi Teknologi Industri, Akademi Kimia Analisis, Akademi Pimpinan Perusahaan.

ANALISA

- Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik : Akademi Teknik PUTL/LPUTL — ITB.
- Departemen Keuangan : Institut Ilmu Keuangan Jurusan: Akuntansi, Kebendaharaan Umum, Bea dan Cukai, dan Pajak.
- Departemen Luar Negeri: Akademi Sandi.
- Departemen Perhubungan : Akademi Ilmu Pelayaran, Akademi Penerbangan Indonesia, Akademi Meteorologi dan Geofisika, Akademi Pos dan Telekom, Akademi Perhotelan Nasional.
- Departemen Penerangan : Akademi Penerangan.
- Departemen Pertambangan : Akademi Minyak dan Gas Bumi, Akademi Geologi dan Pertambangan.
- Departemen Kehakiman : Akademi Imigrasi (Ditjen Imigrasi), Akademi Ilmu Pemasarakatan (Ditjen Bina Tuna Warga).
- Departemen Sosial : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Departemen Perdagangan : Akademi Dinas Perdagangan.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia : Akademi Instrumentasi Nasional.
- Lembaga Administrasi Negara : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Akademi Ilmu Administrasi.

Mereka yang telah menyelesaikan pendidikan menengah kejuruan dapat meneruskan ke tingkat pendidikan tinggi kejuruan, yang antara lain terdiri atas: polyteknik, akademi, atau institut. Mengenai jenjangnya dapat bervariasi antara 3, 4, 5 tahun. Dari tingkat pendidikan tinggi kejuruan ini terdapat mobilitas ke pendidikan guru, pendidikan tinggi kedinasan, dan pendidikan perguruan tinggi, meskipun perlu ditentukan mekanismenya.

Pendidikan guru berada pada tingkat pendidikan tinggi, yaitu setelah pendidikan menengah atau pendidikan menengah kejuruan. Tingkat pendidikan guru ini menyediakan tenaga guru bagi semua jenis pendidikan. Adanya mobilitas dari pendidikan tinggi kedinasan ke pendidikan guru apabila ini menyangkut pemenuhan kebutuhan tenaga guru pada tingkat pendidikan menengah kedinasan atau pendidikan tinggi kedinasan. Mengenai jenjang pendidikan guru, apabila ia ingin menjadi guru Sekolah Dasar, maka lama pendidikannya misalnya dua tahun sedangkan untuk menjadi guru sekolah menengah tingkat atas lamanya tiga tahun. Dengan adanya mobilitas dari pendidikan perguruan tinggi dan pendidikan tinggi kejuruan memungkinkan seseorang untuk menjadi guru setelah mengikuti suatu program guna memperoleh lisensiat supaya diperkenankan untuk mengajar. Pendidikan guru ini dapat berupa institut atau lembaga. Untuk memenuhi keperluan guru yang beraneka ragam institut atau lembaga tersebut di atas harus mampu menghasilkan guru kelas untuk Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar serta guru bidang studi untuk Sekolah Menengah dan bidang tertentu di Sekolah Dasar seperti olah raga, kesehatan dan kesenian dalam jumlah yang cukup dan kualifikasi yang tepat serta dapat ditempatkan di daerah yang memerlukan.

Setelah melewati pendidikan menengah seseorang bisa memasuki tingkat pendidikan Perguruan Tinggi, yang antara lain terdiri atas universitas atau institut dengan penjurusan tingkat sarjana muda dan sarjana misalnya (3 dan 5 tahun). Kemungkinan dari pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi kejuruan ke pendidikan Perguruan Tinggi tetap ada. Bagi para guru maupun para pegawai (yang sudah menyelesaikan pendidikan menengah juga dimungkinkan untuk memasuki pendidikan perguruan tinggi).

Bagi anak-anak yang genius, baik ia berasal dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan menengah kedinasan ataupun pendidikan perguruan tinggi, pendidikan guru, pendidikan tinggi kejuruan dan pendidikan tinggi kedinasan dapat memasuki pendidikan khusus ini.

ANALISA

Penjenjangan di sini agak berlainan, mungkin juga metoda pengajarannya berbeda. Oleh karena kelompok yang genius ini sangat relatif kecil maka pendidikan khusus ini termasuk mahal. Apabila pendidikan khusus ini belum dapat diterima oleh masyarakat karena pendidikan khusus ini menimbulkan elitisme, sebaiknya jika anak-anak yang genius, yang mempunyai suatu kelebihan juga patut diperhatikan.

Apabila suatu masyarakat menyadari bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup maka pendidikan kemasyarakatan dapat berkembang dengan pesat. Setiap manusia Indonesia, tanpa melihat kepada latar belakang pendidikannya, yang ingin mengembangkan dirinya serta membangun masyarakatnya dapat mengikuti pendidikan kemasyarakatan ini. Pada tingkat pendidikan kemasyarakatan ini tidak ada penjenjangan dan pendidikannya biasanya berupa kursus-kursus, program terminal, atau program Paket. Pada tingkat pendidikan dasar ada Program Paket "A" yang dapat dilanjutkan dengan Paket "B" dan seterusnya. Pada tingkat pendidikan tinggi ada universitas terbuka.

Pendidikan luar biasa meliputi pendidikan tuna netra, tuna rungu/wicara, anak terbelakang, cacat tubuh/tuna daksa, dan tuna sosial/tuna laras yang diselenggarakan dalam Sekolah Luar Biasa atau Lembaga. Pada umumnya pendidikan luar biasa ini ditangani oleh badan-badan sosial.

Dari gambaran struktur sistem pendidikan nasional, ada tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah dan tingkat pendidikan atas yang masing-masing sama pentingnya bagi perkembangan dirinya maupun masyarakatnya. Antar semua jenis pendidikan terdapat mobilitas, baik mobilitas vertikal maupun horisontal.

PENUTUP

Pendidikan ternyata memegang peranan yang penting dalam rangka pemerataan pembangunan. Supaya ke-delapan jalur

pemerataan dapat tercapai dibutuhkan suatu sistem pendidikan nasional yang semesta, menyeluruh dan terpadu yang berorientasi pada pemerataan pembangunan di mana manusia dapat mengembangkan dirinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk ini maka struktur pendidikan mempunyai arti yang sangat besar. Di dalam struktur ini ditentukan jenis-jenis pendidikan yang dapat menjadi wahana kemungkinan perkembangan yang merata. Struktur pendidikan juga harus memungkinkan adanya mobilitas vertikal maupun mobilitas horisontal. Mobilitas seperti ini besar sekali artinya bagi proses pemerataan.

Dalam hal ini semua jenis pendidikan harus dipandang sama pentingnya, dan saling menunjang menunjang. Struktur pendidikan, terutama kemungkinan mobilitas vertikal dan horisontal harus diketahui oleh masyarakat dan oleh karena itu perlu adanya penerangan yang jelas kepada masyarakat.

Dalam usaha tercapainya pemerataan pembangunan, suatu perencanaan pendidikan penting agar sistem pendidikannya selaras dengan pembangunan.